

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TIDAK MENYEDIAKAN
AREAL PARKIR (STUDI KASUS DI KELURAHAN LUBUK LINTAH KECAMATAN
KURANJI KOTA PADANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh

MEGA WATI
NIM: 1513030046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

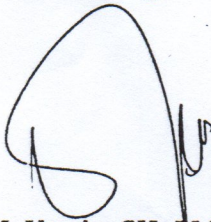
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir (Studi Kasus di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang)”, yang ditulis oleh Mega Wati NIM 1513030046, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas syari’ah, UIN Imam Bonjol Padang. Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

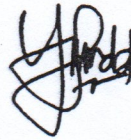
Padang, 26 Juli 2019

Pembimbing I



M. Yenis, SH, M.Pd., MH
NIP. 19601019 1998031 001

Pembimbing II



Yovidal Yazid, SHI., MH
NIP. 19800303 200801 1021

ABSTRACT

This thesis is entitled "REVIEW OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS TOWARDS ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES (UMKM) THAT DO NOT PROVIDE PARKING AREA (CASE STUDY IN KELURAHAN LUBUK LINTAH KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG)" compiled by Mega Wati NIM: 1513030046 Department of Law Syari'ah Economics Faculty Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. This research is motivated by the number of Business Actors who do not provide parking areas so that visitors on the roadside parking can hamper traffic flow due to congestion. The formulation of the problem in this study are: How to Review Islamic Business Ethics Against Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Who Do Not Provide Parking Areas (Case Study in Lubuk Lintah Subdistrict, Kuranji Sub-District, Padang City) The research questions are: first What are the factors which causes small and medium micro businesses (MSMEs) not to provide parking in the Lubuk Lintah sub-district, Kuranji sub-district, Padang City? Secondly, the views of community leaders and government officials on business actors (MSMEs) that do not provide parking areas in Lubuk Lintah sub-district, Kuranji subdistrict, Padang city? Third What is the view of Islamic business ethics on small and medium micro businesses (MSMEs) that do not provide parking areas? To answer the above problems the author uses a type of field research, namely research conducted on business people, visitors, and officials related to business actors who do not provide parking areas. The results of the study the authors can conclude that, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Who Do Not Provide Parking Areas (Case Study in Lubuk Lintah Subdistrict, Kuranji Sub-District, Padang City) is caused by: Land area is limited so that it is inadequate, does not know the rules providing parking area, weak legal awareness of business actors. Business actors must provide parking areas if they have reached the official criteria (traffic impact analysis). The principle of moral integrity, in accordance with Shari'ah provisions in government regulations, and the principle of the three aspects must be fulfilled for business actors.

Keywords: Islamic Business Ethics, Parking.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TIDAK MENYEDIAKAN AREAL PARKIR (STUDI KASUS DI KELURAHAN LUBUK LINTAH KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG)”** disusun oleh Mega Wati NIM: 1513030046 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pelaku Usaha yang tidak menyediakan areal parkir sehingga para pengunjung parkir di pinggir jalan yang dapat menghambat arus lalu lintas disebabkan kemacetan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir (Studi Kasus Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang) Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu: (1) Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang?, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir?, (3) Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir?, Untuk menjawab persoalan diatas penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha, pengunjung, dan pejabat terkait pelaku usaha yang tidak menyediakan areal parkir. Setelah penulis menganalisis berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa, (1) Lahan tempat terbatas sehingga tidak memadai, tidak mengetahui aturan bahwasanya pelaku usaha wajib menyediakan areal parkir, lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha, pelaku usaha harus menyediakan areal parkir apabila telah mencapai kriteria andalalin (analisis dampak lalu lintas). (2) Dalam melakukan kegiatan usaha seseorang juga harus memperhatikan undang-undang yang ditetapkan sehingga kegiatan tersebut tidak keluar dari konteks undang-undang yang telah berlaku. (3) Prinsip integritas moral pelaku usaha harus menjaga nama baik, dan asas maslahat tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan, sesuai dengan ketentuan syari’at dalam aturan pemerintah dalam menjalankan suatu usaha seseorang juga tidak terlepas dari peraturan pemerintah.

ABSTRACT

This thesis is titled **"REVIEW OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS AND POSITIVE LAW OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) WHICH DOES NOT PROVIDE PARKING AREAS (CASE STUDY IN KELURAHAN KELJAHAN KINTJI KURANJI KOTA PIMANG PADANGATIMATI NAD30)"** by: Mega. Syari'ah, Faculty of Sharia, Imam Bonjol State Islamic University, Padang. This research is motivated by the number of Business Actors who do not provide parking areas so that visitors park on the side of the road that can hamper traffic flow caused by traffic jams. The formulation of the problem in this study is: How is the Review of Islamic Business Ethics and Positive Law Against Micro and Small and Medium Enterprises (UMKM) Not Providing Parking Areas (Case Study in Lubuk Lintah Village, Kuranji District, Padang City) The research questions are: (1) What are the factors that lead to micro and small and medium enterprises (MSMEs) that do not provide parking areas in Lubuk Lintah sub-district, Kuranji district, Padang City ?, (2) How does a positive legal review of small and medium-sized micro and small businesses (MSMEs) not provided? Providing Parking Areas? (3) How is the Islamic Business Ethics Review of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Not Providing Parking Areas? To answer the above problem, the writer uses the type of field research (Field Research), namely research conducted on business actors , visitors and officials related to business actors who do not provide parking areas. After the writer analyzes based on the formulation of the problem and research questions, the writer concludes that, (1) Land is limited so it is inadequate, does not know the rules that businesses must provide parking areas, weak legal awareness of business actors, business actors must provide parking areas if they have reach the andalalin criteria (traffic impact analysis). (2) In carrying out business activities, one must also pay attention to the laws stipulated so that these activities do not come out of the context of existing laws. (3) The principle of moral integrity of business actors must maintain a good name, and the principle of benefit must not be made easy and should not be made secret, in accordance with the shari'ah provisions in government regulations in running a person's business, it is also inseparable from government regulations.